

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah pada suatu Negara. Dengan berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK, 2017) menyatakan salah satu upaya mewujudkannya adalah dengan menyusun suatu laporan keuangan pemerintah daerah.

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik harus ditunjang dengan kinerja yang baik khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk mengetahui

apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dilihat dari permasalahan tersebut maka pemerintah daerah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang baik dan handal serta dapat dipertanggungjawabkan (Bastian, 2007).

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban utama akuntan publik yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara transparan akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat *good governance*, (Surjono dan Firdaus 2017), agar informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan dan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut (Dewi, 2015). Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2009) adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan, efisien dan ekonomis atas suatu kegiatan operasi dan melakukan alokasi sumber daya kepada organisasi yang dipercaya serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab pengelolaan secara tepat dan efisien.

Menurut Rahayu dan Santosa. (2014) Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah

harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, dikarenakan laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, maka untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan daerah supaya laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif, berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Bastian, 20010:13).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) adalah ciri seseorang dilihat dari keterampilan dan pengetahuan dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga (Christiawan, 2002).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu proses pembuatan laporan dimulai dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). No. 59 Tahun 2007. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem

akuntansi keuangan daerah, namun tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan.

Rahardi (2007) menyatakan bahwa (TI) mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat pada waktu yang ditentukan. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas harus dapat memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang menggunakan SAP berbasis akrual. Menurut Setiawan (2017) penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya yang diperlukan dalam menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik. Dengan demikian selain Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Teknologi Informasi (TI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berperan penting dalam Kualitas Laporan Keuangan (KLKD).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih banyaknya data yang tidak sesuai serta masih banyak penyimpangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan IHPS (Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester) 1 Tahun 2017 atas 504 LKPD mengungkapkan sebanyak 5.978 permasalahan utama Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terjadi pada Pemerintah Daerah. Permasalahn SPI tersebut meliputi

2.222 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja, dan 1.158 kelemahan struktur pengendalian intern. Badan Pemeriksa Keuangan juga telah melakukan audit atas LKPD di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia selama lima tahun dari tahun 2013 – 2017 adanya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2013 – 2017, meskipun persentase Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tetap lebih besar dari tahun 2013 – 2017, sedangkan Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) persentase semakin kecil dari tahun 2013 ke 2017. BPK hanya memberikan opini WTP atas 16 entitas, opini WDP atas 254 entitas, opini TW atas 23 entitas dan opini TMP atas 103 entitas. Perkembangan opini LKPD dari tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 dinyatakan bahwa terdapat 379 LKPD khususnya pada kabupaten yang diperiksa masih harus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurillah (2014) serta Setiawati, dan Sari (2015) tentang kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada obyek yang diteliti, karena penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar.

Dengan adanya fenomena yang terjadi serta berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,**

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI , PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis dan menguji Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi

Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini untuk berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan gagasan, gambaran serta perbaikan bagi pemerintah daerah dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian yang sebelumnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuannya, penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab agar mempermudah pembahasan yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat tinjauan tentang kualitas laporan keuangan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem akuntansi pemerintah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian, hasil analisis data, dan pembahasannya

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, saran-saran yang diberikan dan hasil penelitian.